

# Paparan RPJMD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025-2029







# VISI KOTA SURABAYA 2025-2029

TRANSFORMASI MENUJU KOTA DUNIA MAJU,  
HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN



## MISI 3

Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik  
dan Reformasi Birokrasi

MEMPERCEPAT TRANSFORMASI PELAYANAN  
PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI

TUJUAN  
MISI 3

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH BERORIENTASI LAYANAN

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya Layanan Publik Prima
INDIKATOR SASARAN	Indeks Inovasi Daerah	Nilai SAKIP	Indeks SPBE	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Survey Penilaian Integritas	Indeks Pelayanan Publik
BIDANG URUSAN	Penelitian dan Pengembangan	• Perencanaan • Sekretariat Daerah	• Komunikasi dan Informatika • Persandian • Statistik • Inovasi	Keuangan	• Pendidikan dan Pelatihan • Kepegawaian	Inspektorat Daerah	• Sekretariat Daerah • Administrasi Umum dan Persiapan • Sekretariat DPRD • Kecamatan

> 1 Bidang Urusan

> 1 Tujuan

> 3 Sasaran

> 3 Program

> 9 Kegiatan

> 18 Sub Kegiatan



Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.



# TUJUAN BPKAD

Meningkatnya akuntabilitas  
penyelenggaraan pemerintah  
daerah

Indikator : Opini BPK

 PAGU ANGGARAN 2026-2030 

2026

125.983.078.817

2027

138.375.475.827

2028

160.822.286.554

2029

183.324.810.889

2030

205.884.380.491





# PROGRAM BPKAD



## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



### Indikator

Tingkat Kepuasan  
Pegawai dalam Pelayanan  
Kesekretariatan



### Target Tahun

2026 94,63%

2027 95,03%

2028 95,43%

2029 95,83%

2030 96,23%





# PROGRAM BPKAD

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



### Indikator

Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap



### Target Tahun

2026 2,56%

2027 2,65%

2028 2,75%

2029 2,84%

2030 2,94%



### Indikator

Persentase register tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang



### Target Tahun

2026 16,01%

2027 16,53%

2028 17,05%

2029 17,56%

2030 17,87%





# PROGRAM BPKAD

## 3. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



### Indikator

Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik



### Target Tahun

2026	40%
2027	40%
2028	40%
2029	40%
2030	40%



### Indikator

Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD



### Target Tahun

2026	30%
2027	30%
2028	30%
2029	30%
2030	30%





# PROGRAM BPKAD

## 3. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



### Indikator

Persentase laporan keuangan tepat waktu



### Target Tahun

2026 100%

2027 100%

2028 100%

2029 100%

2030 100%



### Indikator

Persentase Penurunan SILPA



### Target Tahun

2026 6%

2027 6,5%

2028 6,5%

2029 6,5%

2030 7%





# ANGGARAN PER-PROGRAM

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Anggaran 2028	Anggaran 2029	Anggaran 2030
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.285.978.401	45.479.155.102	46.318.131.430	46.905.650.565	47.488.335.100
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	26.617.495.736	28.628.898.577	30.418.295.813	32.267.695.532	34.096.815.146
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	54.079.604.680	64.267.422.148	84.085.859.311	104.151.464.792	124.299.230.245
<b>Total</b>	<b>125.983.078.817</b>	<b>138.375.475.827</b>	<b>160.822.286.554</b>	<b>183.324.810.889</b>	<b>205.884.380.491</b>



### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Pegawai
- Belanja Wajib Rutin



### Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Pengelolaan Aset
- Pengamanan Aset
- Penanganan Sengketa Barang Milik Daerah



### Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan APBD
- Pertanggungjawaban APBD







# Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi aset



## Inventarisasi barang di Gudang Tambaksari



## Pendampingan Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang dalam proses inventarisasi





# Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

## Optimalisasi pemanfaatan & penggunaan Aset

**3PKAD**  
S U R A B A Y A



Pengecekan kondisi Gedung Hi-Tech



Pemeliharaan Gedung Convention Hall



Pemeliharaan Gedung Wanita





# Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Percepatan sertifikasi aset tanah selain jalan dan saluran dalam rangka mendukung Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP)



Koordinasi dengan Kakan Surabaya 1



Koordinasi dengan Kantah 1 terkait HPL Pemkot dan HGB HPL khusus



Koordinasi dengan Kakantah Surabaya 1



Koordinasi terkait sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya bersama Kanwil, Kantah I, Kantah II, dan KPK







# Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyelesaian Sengketa Aset Tanah dan Bangunan

**3PKAD**  
S U R A B A Y A



Penyelesaian sengketa melalui jalur  
pengadilan (LITIGASI)



Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  
melalui mediasi dengan bantuan kejaksaan  
(NON LITIGASI)





# Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pendampingan Penyusunan APBD



Pendampingan rutin kepada Perangkat Daerah  
dalam rangka mekanisme Penyusunan APBD







# Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pendampingan Pertanggungjawaban APBD



Pendampingan Pertanggungjawaban APBD







# Terima Kasih

